

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara kesatuan republik Indonesia yang terdiri dari dua kata yaitu, *panca* dan *sila*. Panca yang berarti lima, sila berarti dasar atau asas. Jadi Pancasila berarti lima dasar atau lima asas daripada dasar negara republik Indonesia.¹ Sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Apapun mengenai Lima dasar negara itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila yang terdiri atas lima sila menurut Kaelan dan A. Zubaidi dalam Budi Juliardi, pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.² Oleh karena itu Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem, karena Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian (sila-sila) yang memiliki fungsi sendiri-sendiri itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (saling berhubungan) demi mencapai tujuan bersama yaitu suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (pembukaan UUD 1945 alinea IV). Selain itu, sila-sila

¹ Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 248.

² Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

pancasila ini saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan atau majemuk tunggal yang artinya sila-sila pancasila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.

Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*), pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup yang digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari.³ Dengan kata lain, semua tingkah laku dan tindak-tanduk serta perbuatan setiap manusia di Indonesia harus dijiwai oleh sila-sila Pancasila.

Di samping tiga kedudukan utama Pancasila di atas, kita juga mengenal fungsi-fungsi pancasila, antara lain 1) sebagai kepribadian bangsa Indonesia; Pancasila merupakan sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia yang bersifat khas yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain; 2) Pancasila sebagai jiwa dan moral bangsa Indonesia, artinya Pancasila itu merupakan jiwanya bangsa Indonesia; 3) Pancasila sebagai perjanjian luhur, maksudnya Pancasila itu merupakan hasil perjanjian dari wakil-wakil rakyat yang mengesahkan perjanjian itu; 4) sebagai falsafah yang mempersatukan bangsa Indonesia, dalam artian bahwa pancasila merupakan sarana yang ‘ampuh’ untuk mempersatukan bangsa Indonesia; 5) sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia, maksudnya Pancasila itu merupakan prinsip yang mengantarkan bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita nasionalnya.⁴

Berbicara mengenai cikal bakal terbentuknya dasar negara, Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Tetapi, ada tokoh lain yakni tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, seperti Kh.

³ Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 227.

⁴ Suparlan Al Hakim, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia* (Malang: Madani, 2014), 276-277.

Wahid Hasyim dari kalangan NU maupun ulama lain dari kalangan Muhammadiyah. Kehadiran para tokoh ulama tersebut tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila yang Islami, yaitu Pancasila yang menampakkan ke-*rahmatan lil 'alamin* ajaran Islam, bukan Pancasila yang jauh dari dan sepi dari nilai-nilai keislaman. Sehingga bisa dikatakan bahwa Islam juga sebagai faktor politis beserta elemen lainnya, yang ikut memberikan kontribusi terhadap lahirnya nasionalisme, yang membuka jalan bagi embrio demokrasi dalam skala yang lebih luas.⁵

Islam berasal dari kata Arab, *aslama-yuslimu-islaman*, yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, damai dan sejahtera. Islam atau Islaman adalah bentuk masdar sebagai bahasa penunjuk dari fi'il, yaitu *aslama* yang bermakna telah selamat dan *yuslimu* bermakna menyelamatkan. Kesemuanya berakar dari kata salam yang berarti kedamaian dan keselamatan. Kata Islam lebih spesifik lagi didapat dari bahasa Arab *aslama*, yang bermakna “untuk menerima, menyerah atau tunduk” dan dalam pengertian yang lebih jauh tunduk dan patuh kepada Tuhan.⁶Jadi Islam itu memelihara diri agar berada dalam keadaan selamat dan sejahtera dengan cara menyerahkan diri, taat, dan patuh serta tunduk kepada Allah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Islam sebagai agama, memberikan konsep ajaran yang komprehensif..., tidak hanya membahas pada persoalan *ubudiyah* (ibadah) khusus seperti shalat, puasa dan lainnya, tetapi juga menyangkut kode etik sosial yang digunakan manusia sebagai perangkat penataan sosial yang diarahkan pada kemaslahatan

⁵ Susmihara, "Islam dan Nasionalisme di Indonesia, *Jurnal Rihlah*, 4 (2016), 51.

⁶ Ah. Choiron, "Islam Dan Masalah Kemanusiaan Perspektif Pendidikan Pembebasan", *jurnal penelitian pendidikan islam*, 12 (Pebruari, 2017), 88-89.

manusia itu sendiri.⁷ Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang mengatur segala bidang atau sendi kehidupan dan tidak hanya seputar masalah *ubudiah*.

Meskipun kenyataannya seperti itu, kalau kita berbicara mengenai hubungan antara Islam dan Pancasila sering menimbulkan kontroversi yang berkelanjutan di kalangan para ahli. Kontroversi itu, di mulai dari hubungan yang tidak harmonis antara Islam sebagai agama dan negara.⁸ Sehingga menimbulkan tiga sudut pandang yang berbeda mengenai relasi tersebut, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.⁹

Paradigma integralistik menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Tokoh-tokoh utama dari paradigma ini adalah Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan tentu saja Abu al-A'la al-Maududi.¹⁰

Paradigma simbiotik, menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya semata. Paradigma ini berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Tokoh yang termashur dalam paradigma ini adalah Muhammad 'Abduh dan Muhammad Husein Haikal.¹¹

⁷ Eko Nur Salim, "Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Di Era Globalisasi (Suatu Ikhtiar Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean/Mea)", *At-Turats*, 1 (2016), 43.

⁸ Abd. Mannan, "Islam dan Negara", *Islamnuna*, 2 (Desember, 2014), 189.

⁹ Abd. Salam Arief, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam", *Hermeneia*, 2 (Juli-Desember, 2003), 286.

¹⁰ Zapulkhan, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam", *Walisongo*, 22 (Mei, 2014), 106-107.

¹¹ Ibid.

Paradigma sekularistik, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut paradigma ini, secara historis wilayah nabi Muhammad terhadap kaum mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan. Sebagian tokoh terkenal yang mendukung konsep ini adalah ‘Ali Raziq dan Thaha Husein.¹²

Berdasarkan tiga paradigma ini, Indonesia berada pada paradigma yang ketiga, yaitu simbiotik. Hal ini dikarenakan, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan syaria Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum. Juga, tidak menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan sistem pemerintahan.¹³ Tetapi hanya menjadikan Islam sebagai seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.¹⁴

¹² Ibid.

¹³ Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Kalimah*, 13 (Maret, 2015), 213.

¹⁴ Ibid., 209.

Berbicara mengenai nilai-nilai dalam Pancasila sendiri sudah sesuai dengan nilai-nilai Keislaman. Hal tersebut diperjelas dalam penjelasan UUD 1945 Perspektif Islam, bahwa komponen Pancasila sudah sesuai dengan Islam. *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman. *Kedua*, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam Hak Asasi Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. *Ketiga*, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dengan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia. *Keempat*, Kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan di antara pihak yang berkepentingan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menumbuhkan tanggungjawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. *Kelima*, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.¹⁵

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat relasi yang kuat dan saling mempengaruhi antara Islam dan Pancasila. Pengamalan ajaran Islam secara konsekuen dapat memperkuat implementasi ideologi Pancasila dalam konteks kebangsaan. Pancasila itu meskipun tidak mewakili agama tertentu, tetapi

¹⁵ Ibid.

meniscayakan agar seluruh rakyat Indonesia sebagai manusia bertuhan dan beragama, dan wajib mentaati ajaran agamanya. Hal ini bermakna pula bahwa Negara menjamin kemerdekaan rakyatnya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya dan mendorong rakyat untuk taat menjalankan ajaran agamanya, sehingga pengamalan Pancasila menjadi lebih konkret.¹⁶

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa kaum muslim Indonesia menerima Pancasila ...dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan Pancasila ... menurutnya sama dengan kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu *Piagam Madinah*, dan umat pada masa Rasulullah menerima konstitusi Madinah dalam rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat politik bersama.¹⁷

Tetapi, meskipun kenyataannya seperti itu. Akhir-akhir ini masih ada organisasi masyarakat Islam yakni HTI yang anti Pancasila yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan negara *khilafah*. Mereka mengklaim bahwa gagasan-gagasan yang mereka perjuangkan adalah murni Islam.¹⁸ Di samping itu, mereka menganggap bahwa nilai-nilai dalam Pancasila bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dipertegas oleh Ismail Yusanto selaku juru bicara HTI bahwa semua yang berkaitan dengan Amerika Serikat bertentangan dengan Islam. Dia mengatakan:

Politik luar negeri Amerika hingga detik ini masih dalam mangat seperti slogan kuno, yang banyak orang mengira mungkin sudah tidak relevan. Tapi, saya melihatnya semangat itu masih ada, yaitu *gold, glory* dan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ La Ode Ismail Ahmad, "Relasi Agama dengan Negara dalam Pemikiran Islam (Studi Atas Konteks Ke-Indonesia-An)", *Millah*, 10 (Pebruari, 2011), 276.

¹⁸ Erni Sari Dwi Devi Lubis dan Ma'arif Jamuin, "Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia", *suhuf*, 27 (november, 2015), 163

gospel. Gold itu mewakili bagaimana dia mendominasi sumber-sumber ekonomi... kemudian *glory* itu semangat mendominasi politik, sedangkan *gospel* semangat misionaris. Jadi, kalau menurut saya, tidak akan berubah. Yang disebut baik itu ialah ketika dia tampil melakukan kebaikan di mana pun dia. Maka, omong kosong dengan semua iming-iming Amerika itu tentang demokrasi, pluralisme, toleransi. Segala macam itu tidak ada faktanya... saya sekarang berada pada posisi selalu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Amerika.¹⁹

Dalam pernyataan tersebut HTI menganggap bahwa Pancasila bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini tentunya secara tidak langsung mengatakan bahwa Pendidikan Pancasila jauh dari nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, apa benar yang dilontarkan organisasi masyarakat HTI bahwa Pancasila jauh dari nilai-nilai Keislaman. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengungkap nilai-nilai Keislaman dalam Pancasila, dengan mengangkat judul **“Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Pancasila Kajian Atas Pemikiran Nurcholis Madjid”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Nurcholis Madjid tentang hubungan nilai-nilai keislaman dan Pendidikan Pancasila?
2. Bagaimana nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Pendidikan Pancasila kajian atas pemikiran Nurcholis Madjid ?

¹⁹ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 126-127.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemikiran Nurcholis Madjid tentang hubungan nilai-nilai keislaman dan Pendidikan Pancasila.
2. Mengetahui nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam pendidikan pancasila kajian atas pemikiran Nurcholis Madjid.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan Islam serta menambah referensi terkait dengan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Pancasila.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan karya ilmiah, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang pendidikan pancasila, khususnya pada Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Pancasila Kajian Atas Pemikiran Nurcholis Madjid.

b. Bagi Peserta Didik

Hasil penelitian ini bagi peserta didik berguna sebagai acuan dalam pendidikan pancasila khususnya Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Pancasila Kajian Atas Pemikiran Nurcholis Majid.

c. Bagi Pendidik

Hasil penelitian ini bagi pendidik berguna sebagai acuan dalam pendidikan pancasila yang bernuansa islami khususnya Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Pancasila Kajian Atas Pemikiran Nurcholis Madjid.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu penjelasan singkat terhadap kajian-kajian yang pernah dilakukan atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Telaah pustaka dimaksudkan agar penulis mendapatkan data atau informasi selengkap-lengkapnyanya mengenai masalah yang dikaji.

Berdasarkan hasil pencarian di perpustakaan STAIN Kediri dan online, di sini penulis belum menemukan sebuah skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Pancasila Kajian Atas Pemikiran Nurcholis Madjid.”. Adapun kajian atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan topik ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jawahir, berjudul tentang “Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Politik Islam” yang mengkaji

pemikiran Nurcholis Madjid tentang politik Islam dan dasar-dasar politik Islam. Dalam skripsi tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa konsep negara islam adalah sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan Negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sementara agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi.²⁰ Di dalam skripsi itu terdapat letak perbedaan dan persamaannya;

Perbedaan, hanya terfokus pada politik Islam dan tidak terlalu membahas kepada Pancasila. Karena kajiannya hanya seputar negara dan agama.

Persamaan, sama membahas negara dan agama, tetapi peneliti lebih condong kepada dasar negara yakni Pancasila dalam Pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah berdasarkan pada penciptaan gambar *holistic* yang dibentuk kata-kata dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu teks dalam sebuah latar ilmiah.²¹

²⁰ Muhammad Jawahir, "Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Politik Islam", *Skripsi*, (Juni, 2016), Vii.

²¹Husaini Usman & Purnomo S. Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 81.

Jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan studi tokoh. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebuah penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk membahas buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.²²

Studi tokoh merupakan sebuah penelitian yang mengungkapkan sebuah perjalanan hidup dan pemikiran dari seorang tokoh yang dianggap mempunyai suatu ketertarikan untuk diteliti, bisa karena keberhasilannya atau suatu keunikan yang ada pada dirinya. Adapun tujuan dari studi tokoh ini adalah untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seorang individu dalam suatu komunitas tertentu, dan melalui riwayat hidupnya, seorang peneliti dapat menemukan motivasi, aspirasi, dan ambisinya tentang kehidupan tokoh tersebut.²³

Dalam penelitian studi tokoh ini peneliti memilih pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif ini lebih tepat digunakan daripada menggunakan pendekatan kuantitatif, dan hal ini diperkuat dengan teorinya Arief Furchan dan Agus Maimun sebagai berikut :

Dalam studi tokoh, metode yang digunakan untuk meneliti subyek penelitian akan mempengaruhi cara peneliti memandang subyek tersebut. Jika subyek dipandang oleh peneliti berdasarkan angka atau kriteria tertentu, maka peneliti akan kehilangan sifat subyektif perilaku manusiawi sang tokoh. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat mengenal lebih jauh dan mendalam mengenai sang tokoh secara pribadi dan melihat dia mengembangkan definisinya sendiri tentang dunia dengan berbagai pemikiran, karya, dan perilaku yang dijalaninya. Peneliti dapat merasakan apa yang dirasakan,

²² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, 8 (Mei, 2014), 68.

²³ Arief Furchan Dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005), 6-7.

dipikiran, dan diucapkan sang tokoh dalam pergulatan dengan komunitasnya.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kepustakaan ada dua macam, yakni sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang dapat memperkaya penelitian.²⁵

Dalam penelitian kepustakaan ini, peneliti mempunyai beberapa data primer, yakni buku Islam Kemordenan dan Keindonesiaan, ensiklopedi Nurcholis Madjid jilid 1-4, Membaca Nurcholis Madjid Islam Dan Pluralisme Edisi Digital, Tradisi Islam Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia dan masih banyak lagi, dan Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Adapun data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah data penunjang yang berkaitan dengan judul penelitian ini, seperti beberapa judul buku sebagai berikut: Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran Dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Dan Jalaluddin Rakhmat, Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Dan Masih Ada Beberapa Penunjang Lainnya, Selain Itu Juga Didukung Oleh Beberapa Jurnal.

²⁴Arief Dan Agus, *Studi Tokoh*,. 16

²⁵Suyadi, *Libas Skripsi Dalam 30 Hari* (Yogyakarta : Diva Press, 2011), 64-65.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian kepustakaan ini adalah metode dokumenter, yakni mengumpulkan sumber data, baik data primer maupun sekunder, kemudian mendisplaynya. Selanjutnya, dokumen tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang diperlukan sesuai rumusan masalah. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok agar terorganisir dengan baik. Data yang telah terorganisir ke dalam beberapa kelompok tersebut disistematisasikan agar mempermudah proses analisis selanjutnya.²⁶

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Adapun bentuk-bentuk dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut :

a. Metode analisis deskriptif.

Yaitu, melakukan analisis hanya sampai pada taraf diskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁷ Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk gambaran penyajian laporan tersebut.

b. *Content Analysis* atau analisis isi

Ini adalah teknik untuk menarik kesimpulan melalui sebuah usaha menemukan karakteristik pesan, yang penggarapannya

²⁶Suyadi, *Libas Skripsi*, 65-66.

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya Cet 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 22.

dilakukan secara obyektif dan sistematis. Selain itu, *Content analysis* juga digunakan untuk membandingkan isi buku dengan buku lain yang masih mempunyai bidang kajian yang sama, baik berdasarkan pada perbedaan waktu, maupun mengenai kemampuan buku.²⁸ Selain itu, untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap perlu yaitu sebagai berikut :

1) Metode Deduksi

Metode ini merupakan akar pembahasan yang berangkat dari realitas yang bersifat umum kepada sebuah pemaknaan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menguraikan data dari suatu pendapat yang bersifat umum kemudian diuraikan menjadi hal-hal yang bersifat khusus.²⁹

2) Metode Induksi

Metode ini merupakan alur pembahasan yang berangkat dari realita-realita yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari realita-realita yang konkret itu ditarik secara general yang bersifat umum.³⁰

²⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 172-173.

²⁹ Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 6 (juli-desember, 2016), 133.

³⁰*Ibid.*, 135.

3) Metode Komparasi

Dengan metode ini dimaksudkan untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari beberapa ide dan sekaligus mengetahui lainnya kemudian dapat ditarik konklusi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dari alur penulisan skripsi, sehingga pembaca mudah mengenali konstruk skripsi. Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab sesuai dengan kajian yang akan dilakukan penulis.

Bab pertama berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas kajian teori mengenai Pendidikan Pancasila, Nilai Keislaman, dan Islam dan Pancasila.

Bab ketiga, membahas biografi dan riwayat pendidikan Nurcholis Madjid, karya-karyanya dan pemikirannya tentang Nilai-nilai Keislaman dalam Pendidikan Pancasila.

Bab keempat berupa Analisis pemikiran Nurcholis Madjid tentang hubungan Nilai-nilai Keislaman dan Pendidikan Pancasila, dan Nilai-nilai

keislaman yang terkandung dalam pendidikan pancasila kajian atas pemikiran Nurcholis Madjid

Bab kelima, adalah bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penulisan. Bahasan ini juga sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang diajukan dalam pembahasan, sekaligus memuat sejumlah saran-saran kepada seluruh pihak yang berkompeten dalam penelitian ini.